

**CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023**

No	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindakanjuz Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tenaga Kerja	Disnaker	Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,71%	73,37%			
				<b>PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	69,23%	89,43%			
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Pencari Kerja yang di latih di BLK	69,23%	89,43%	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi masih belum optimal tingkat keseluruhan peserta yang lulus kompetensinya	Melakukan proses seleksi (rekrutmen) calon peserta pelatihan secara lebih maksimal agar peserta pelatihan yang diterima benar - benar sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis serta jurusan yang dipilih sesuai dengan minat peserta	
				Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Pengangguran dan Pencari Kerja yang dilatih	336 Orang	336 Orang	Pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi masih belum optimal tingkat keseluruhan peserta yang lulus kompetensinya	Melakukan proses seleksi (rekrutmen) calon peserta pelatihan secara lebih maksimal agar peserta pelatihan yang diterima benar - benar sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis serta jurusan yang dipilih sesuai dengan minat peserta	
				<b>PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>	Persentase Pencari Kerja yang di fasilitasi	77,85%	94,96%			
				Pelindungan PMI(Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang fasilitasi	77,85%	94,96%	Tidak semua Pekerja Migran Indonesia (PMI) terfasilitasi dalam penangannya	Berkoordinasi dengan Disnakertrans Provinsi Jawa Timur dan BP3MI Jawa Timur	
				Peningkatan Pelindungan dan	Jumlah Pendampingan PMI	100 Orang	38 Orang	Tidak semua Pekerja Migran Indonesia	Berkoordinasi dengan Disnakertrans	
				<b>PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	100%	100,00%			

Pengesahan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	100%	100,00%	Pembinaan dan sosialisasi tentang pengesahan perusahaan UMK dan permasalahan ketenagakerjaan kepada perusahaan? tidak bisa optimal di laksanakan karena minimnya dukungannya anggaran	Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara non tatap muka dengan perusahaan melalui media sosial	
Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang diberi sosialisasi peraturan pelaksanaan Penyusunan UMK	90 Perusahaan	82 Perusahaan	Pembinaan dan sosialisasi tentang pengesahan perusahaan UMK dan permasalahan ketenagakerjaan kepada perusahaan? tidak bisa optimal di laksanakan karena minimnya dukungannya anggaran	Melakukan pembinaan dan sosialisasi secara non tatap muka dengan perusahaan melalui media sosial	
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sengketa Pengusaha Pekerja yang diselesaikan	100%	100,00%	Terjadi kasus antara pekerja dan pengusaha terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)	Telah di selesaikan dengan menghadirkan pekerja dan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dan telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha	
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus hubungan industrial yang diselesaikan	3 Kasus	3 Kasus	Terjadi kasus antara pekerja dan pengusaha terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR)	Telah di selesaikan dengan menghadirkan pekerja dan Pengawas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur dan telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi	100	100			
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase Laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Yang Tersusun Tepat Waktu	100	100			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	3			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	1			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	1			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	1			

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	*Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	1			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	1			
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyusunan laporan keuangan yang baik dan tepat waktu</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (OB)	12	12			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	3			
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	14	14			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	10	10			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	38	38			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2	2			
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	2			
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	2			
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	1			
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Yang dipelihara</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2			
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	29	29			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	*Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1			

KEPALA DINAS TENAGA KERJA  
KABUPATEN SAMPANG

**YUDHI ADIDARTA KARMA, S.STP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19780720 199804 1 001